



[DR. dr. Tan Shot Yen, M. hum.](#)

Dokter, ahli nutrisi, magister filsafat, dan penulis buku.

Yang Kritis Menjadi Skeptis Berakhir Tragis

Kompas.com - 15/12/2017, 07:15 WIB



-(shutterstock)

KOMPAS.com - Dunia kesehatan kita sedang dirundung Kejadian Luar Biasa (KLB), berupa bangkitnya penyakit [Difteri](#). Kasus fatal tidak hanya menghantui usia balita, tapi juga sudah merenggut nyawa dewasa.

Penolakan [vaksinasi](#) atau [imunisasi](#) yang dijalankan setengah-setengah menjadi faktor penyebab wabah tersebut.

Sangat menarik untuk kita amati reaksi berbagai komunitas dan kalangan menghadapi ancaman infeksi yang serius ini.

Bahkan, ada sebagian orang yang menganggapnya sebagai *hoax* (saking sudah terlalu banyaknya berita bohong, barangkali) dan pihak pemda yang menolak wilayahnya disebut terjangkit KLB, akibat belum paham kriteria KLB yang sebenarnya.

[Baca juga : [Jangan Salah Mengira, Waspada Gejala-gejala Khas Difteri Ini](#)]

Saat saya berbincang dengan beberapa teman perihal keengganan orang memberi vaksinasi ke anaknya, ada orang yang begitu gregetan hingga melontarkan kata-kata cukup pedas, "Tunggu saja sampai ada keluarganya yang kena, nah... baru tahu dia!".

Sejenak saya berpikir keras, apa yang salah ya dengan semua program preventif promotif, sehingga tidak mendapat antusiasme publik. Padahal, jelas-jelas bertujuan melindungi semua orang dari kesakitan, kecacatan bahkan kematian?

Mau tak mau, kita harus melihat kembali ke belakang, memutar semua rekaman masa lalu yang sebetulnya menjadi oto-kritik pelaku dunia kesehatan.

Sayangnya, umpan balik seperti ini tidak pernah dibahas apalagi ditanggapi serius untuk memodifikasi cara pendekatan yang lebih baik.

Mulai dari vaksin palsu yang melunturkan rasa kepercayaan publik, hingga proses edukasi yang lebih bersifat seperti menuntut kepatuhan ketimbang pemahaman.

Tidak hanya urusan vaksinasi, hal mirip-mirip serupa terjadi belakangan ini - publik lebih mempercayai pelbagai himbauan kesehatan yang katanya 'alami' (tapi lebih banyak hoax-nya) ketimbang mendengar nasehat dokter, apalagi menjalankan prosedur tindakan medik yang jelas-jelas mempunyai dasar pembuktian yang ilmiah.

Kondisi tersebutlah yang kemudian dimanfaatkan habis-habisan oleh orang-orang yang punya keahlian menjual pil ajaib dan tongkat mujarab.

[Baca juga : [Mari Mengintip Cara Dokter Tangani Pasien yang Diduga Difteri](#)]

Tingginya kecepatan penyampaian informasi dan tunggang langgang berita membuat publik terpapar dengan banyak sensasi ketimbang edukasi.

Lihat betapa girasnya pelacak berita membeberkan semua kejadian miris dan mengundang emosi di pelosok daerah, mulai dari anak kurang gizi hingga kejadian heboh pasca imunisasi - ketimbang menampilkan data berapa banyak anak terselamatkan dari diare berkat dijalankannya Perilaku Hidup Bersih Sehat.

Hal yang sama, kisah penyintas kanker di internet kurang pembacanya ketimbang berita berseri-seri tentang artis penderita kanker stadium akhir, yang akhirnya juga meninggal setelah menghabiskan ratusan juta demi kemoterapi dan berulang kali operasi. Tebak, apa yang ditangkap awam yang sedang berusaha mengkritisi situasi?

Skeptisisme publik terhadap layanan kesehatan konvensional makin hari makin mengkhawatirkan, walaupun akhirnya mereka memaksa untuk diberi tindakan medik saat sudah kritis dan gawat. Seakan-akan masuk UGD atau ICU meloloskan orang dari sakratul maut.

Saat pengantar pasien gugup dan kalap, dokter dan tenaga kesehatan lainnya rentan terhakimi di tempat, minimal menjadi sasaran perundungan - karena persepsi istilah atau jenis tindakan antara keluarga pasien dan dokter tidak sama.

Kekisruhan dalam hitungan menit bertambah runcing saat tenaga kesehatan tidak fasih berkomunikasi efektif.

Kehebohan ini terekam pula oleh kamera jurnalis dan lekas tersebar dengan bahasa sensasional, menghasilkan opini publik yang viral.

[Baca juga : [Kebiasaan Salah Menuai Sekian Masalah](#)]

Otokritik terhadap layanan kesehatan sudah waktunya kita hadapi dengan lapang dada. Disinilah letaknya reformasi.

Sudah tidak jaman lagi slogan-slogan retorika dan semboyan-semboyan klasik cuma jadi hafalan saat pejabat pusat kunjungan kerja ke daerah.

Faktanya, layanan kesehatan masih menggunakan pendekatan yang sama. Tidak cukup juga istilah petugas kesehatan yang ramah, sementara isi pembicaraan hanya basa-basi, karena angka kematian ibu dan bayi masih tinggi.

Cakupan imunisasi masih rendah. Orang lebih berebut beli sari kurma di musim demam berdarah ketimbang pergi ke sarana kesehatan.

[Baca juga : [Mengapa Dunia Pengobatan Selalu Menarik?](#)]

Parameter keberhasilan upaya preventif dan promotif memang sulit ditemukan. Apalagi jika ingin dijabarkan secara statistik.

Belum lagi perubahan isi 'piring makanku' dan asupan sayur buah hingga 600 gram per hari seperti anjuran Kemenkes sebagai pencegahan terhadap sekian banyak Penyakit Tidak Menular seperti hipertensi, stroke, diabetes, kanker.

Jika upaya yang jelas-jelas mencegah penyakit menular saja masih mempunyai begitu banyak kendala dan hambatan, apalagi 'anjuran' hidup sehat untuk mencegah diabetes dan hipertensi yang masih dianggap penyakit keturunan?

Negeri kita membutuhkan niat baik dan upaya tanpa pamrih dari banyak pihak, untuk membuat keraguan dan sikap skeptis menipis hingga akhirnya sirna.

Nalar publik yang kritis perlu dikenyangkan dengan pemahaman utuh, bukan penjelasan sepotong-sepotong apalagi tuntutan kepatuhan untuk hidup sehat.

Sebab, siapa sih nekat mau menjajal hidup menderita akibat penyakit, atau terjebak dalam situasi kritis mengancam nyawa? Setiap penolakan, resistensi, hendaknya menjadi teguran bagi kita: ada apa? Jaman berubah, masyarakat berubah, cara berkomunikasi dan pendekatan edukasi pun (mestinya) berubah.

Jangan-jangan, kita masih berandai-andai hidup seperti di masa lalu, di mana segala sesuatunya bisa diredam dengan ancaman dan saling menyalahkan. Semoga tidak.

[Baca juga : [Tingkat Kepercayaan: Edukasi, Inspirasi atau Sensasi?](#)]

Difteri Mewabah, MUI Belum Terbitkan Sertifikasi Vaksin Halal



Petugas Dinas Kesehatan Pemprov Banten memasukan vaksin DPT anti penyakit difteri ke jarum suntik di Posyandu Cempaka, Kaujon, Serang, Banten, Senin (11/12/2017). ANTARA FOTO/Asep/Fathulrahman

Reporter: [Dipna Videlia Putsanra](#)

12 Desember, 2017 *dibaca normal 1:30 menit*

- ***"Setelah ditemukan vaksin yang halal maka pemerintah wajib menggunakan vaksin yang halal," ucap Zainut***

MUI menyatakan imunisasi sifatnya mubah, namun harus menggunakan vaksin halal kecuali dalam kondisi darurat.

[tirto.id](#) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi menyatakan MUI belum menerima pendaftaran dan permintaan pemeriksaan kehalalan vaksin difteri dari pihak manapun.

"Sehingga MUI belum pernah menerbitkan sertifikasi halal terhadap vaksin tersebut," kata Zainut kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Ia melanjutkan, pada dasarnya hukum imunisasi adalah boleh (*mubah*) sebagai bentuk upaya mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Meski begitu, vaksin yang digunakan dalam imunisasi harus halal dan suci. Jika belum ada vaksin halal dan dalam kondisi darurat mengancam jiwa maka diperbolehkan untuk digunakan.

"Setelah ditemukan vaksin yang halal maka pemerintah wajib menggunakan vaksin yang halal," ucap Zainut, menegaskan.

Kondisi darurat itu diartikan sebagai suatu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan tindakan imunisasi dapat mengancam jiwa manusia (*mudarat*) atau kondisi hajat yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan tindakan imunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang.

"Ketentuan tersebut di atas harus dipastikan bahwa memang benar-benar belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci dengan didukung keterangan tenaga ahli yang kompeten dan dapat dipercaya," kata dia, seperti dikutip *Antara*.

Pada 6 Desember lalu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, sebanyak 66 persen dari keseluruhan kasus difteri yang terjadi sepanjang 2017 di seluruh Indonesia adalah karena penderitanya tidak diimunisasi.

"Ini kenyataannya bahwa sebagian besar tidak diimunisasi," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Muhammad Subuh di Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Menurut Subuh, 66 persen kasus difteri yang ada karena tidak ada imunisasi sama sekali, 31 persen imunisasi kurang lengkap, dan 3 persen lainnya imunisasi lengkap.

Pada Januari hingga November 2017, tercatat 593 kasus difteri terjadi di Indonesia dengan angka kematian 32 kasus. Kasus tersebut terjadi di 95 kabupaten-kota pada 20 provinsi.

Oleh karena itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mendesak masyarakat yang kerap menolak imunisasi, atau biasa disebut kelompok anti-vaksin, mengubah sikap. Dia meminta kelompok ini bersedia mengikuti imunisasi Difteri. Hal ini menyusul adanya kejadian luar

biasa (KLB) penyakit itu di 11 Provinsi di Indonesia.

Nila menegaskan sikap masyarakat, yang masih menolak anaknya mengikuti imunisasi Difteri, bisa membahayakan orang lain. "Saya kira mereka harus sadar. Jangan merusak (kekebalan kelompok) untuk masyarakat yang lain," kata Nila di Jakarta, pada Senin (11/12/2017) seperti dikutip Antara.

Menurut Nila, imunisasi dengan menggunakan vaksin, yang selama ini ditolak sebagian kalangan dengan alasan agama, membawa lebih banyak kemaslahatan ketimbang mudharat. Dia juga menyampaikan bahwa imunisasi merupakan upaya memenuhi hak anak untuk sehat.

Baca juga artikel terkait [DIFTERI](#) atau tulisan menarik lainnya [Dipna Videlia Putsanra](#) (tirto.id - dip/dip)